

## **BAB IX**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Dengan memperhatikan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai selama periode 2011-2016, pentahapan pembangunan dan penetapan indikator kinerja daerah

#### **9.1. PENTAHAPAN PEMBANGUNAN**

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Nias 2011-2016 **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN NIAS YANG BERKEADILAN, SEJAHTERA, DAN MANDIRI YANG DILAYANI OLEH PEMERINTAH YANG BERSIH DAN RESPONSIF”** sebagai tujuan akhir, misi, tujuan dan sasaran, maka perlu disusun pentahapan pembangunan. Tahapan pembangunan Kabupaten Nias 2011-2016 dalam 5 tahap.

##### **9.1.1. Tahap Transisi : Komitmen (Tahun 2011)**

Tahap pembangunan 2011 merupakan tahapan untuk menyambung, melanjutkan dan menajamkan capaian RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2006-2011. Tahap pembangunan 2011 juga merupakan tahap untuk menjaga, meneruskan dan melanjutkan yang sudah dicapai dan dilaksanakan. Selain itu, tahap pembangunan ini juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur guna membuka aksesibilitas ke 3 wilayah kecamatan yang belum terjangkau kendaraan roda 4 (empat). Untuk mendapatkan hasil pembangunan yang optimal juga dilakukan beberapa penataan antara lain pembuatan dan penyempurnaan regulasi, penyusunan dokumen tata ruang.

Tahap pembangunan 2011 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana daerah dengan memprioritaskan ruas jalan sebagai berikut:
  - 1) Ruas Jalan Sogaeadu – Somolo-molo
  - 2) Ruas Jalan Hiliweto – Lasara S.
  - 3) Ruas Jalan Tetehosi - Holi.
- b. Penetapan ibukota Kabupaten Nias
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperluas akses pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- d. Mengutamakan pembangunan pertanian sebagai penghasil komoditi unggulan daerah.
- e. Mendorong pemberdayaan dan pengurangan kemiskinan.

- f. Meletakkan landasan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

### **9.1.2. Tahap Penguatan (Tahun 2012)**

Tahap pembangunan 2012 merupakan tahapan untuk memperkuat landasan pembangunan daerah. Tahap pembangunan ini mengutamakan pemantapan pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, penguatan pertanian, dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Tahap pembangunan 2012 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis terutama membuka akses jalan antar ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan dan jaringan infrastruktur pendukungnya.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperluas akses pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- c. Memantapkan pengembangan sumber daya manusia dengan melaksanakan pemberian beasiswa berprestasi, mengembangkan sekolah unggulan dan fasilitasi pendirian Perguruan Tinggi Negeri.
- d. Menajamkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan memperkuat sinergi antar SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias.
- e. Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah dari usaha pertanian dalam arti luas termasuk Pengembangan ekonomi unggulan daerah serta meningkatkan pendapatan petani.
- f. Penyehatan dan pengembangan BUMD melalui investasi pada unit-unit usaha baru.
- g. Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur

### **9.1.3. Tahap Percepatan (Tahun 2013)**

Tahap pembangunan 2013 merupakan tahapan untuk mempercepat pembangunan daerah. Tahap pembangunan 2013 mengutamakan peningkatan penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana daerah, pengembangan UMKMK, penerapan teknologi informasi (e-Government) dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

Tahap pembangunan 2013 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

- a. Meningkatkan penyediaan infrastruktur strategis dan jaringan infrastruktur pendukungnya.

- b. Memantapkan pengembangan sumber daya manusia dengan penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi, dan mengembangkan sekolah unggulan.
- c. Menajamkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- d. Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah dari pertanian.
- e. Mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UKM) terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran.
- f. Mengadopsi dan menerapkan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.

#### **9.1.4. Tahap Pemantapan (Tahun 2014-2015)**

Tahap pembangunan 2014-2015 merupakan tahapan untuk memantapkan pembangunan Kabupaten Nias. Tahap pembangunan ini mengutamakan pengembangan industri, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, penataan ibukota Kabupaten Nias serta pengembangan agribisnis dan agroindustri.

Tahap pembangunan 2014-2015 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

- a. Meningkatkan penyediaan infrastruktur strategis.
- b. Terbangunnya sarana prasarana pemerintahan.
- c. Memantapkan pengembangan sumber daya manusia.
- d. Menajamkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- e. Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah dari pertanian menuju agribisnis dan agroindustri.
- f. Mengembangkan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dengan membangun kerjasama dan kemitraan regional dan global.
- g. Mengadopsi dan menerapkan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh pelayanan publik.

#### **9.1.5. Tahap Perwujudan (Tahun 2016)**

Tahap pembangunan 2016 merupakan tahapan akhir, namun masih tetap merupakan kelanjutan dan penuntasan bagi keseluruhan tahap pembangunan selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan ini harus dipandang sebagai kebijakan akhir dengan tetap melihat keberhasilan tahap-tahap sebelumnya. Dengan asumsi bahwa tahap-tahap sebelumnya telah berhasil dilakukan, maka pemberdayaan ekonomi kerakyatan berujung

pada pengembangan daya saing ke segi orientasi ekspor untuk komoditas unggulan daerah.

Tahap pembangunan 2016 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

- a. Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan;
- c. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
- d. Penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan;
- e. Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan;
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
- g. Pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi, komunikasi, informatika, pengairan dan kelistrikan;
- h. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat;
- i. Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur;
- j. Pengembangan budaya lokal;
- k. Pengembangan daya saing dan orientasi ekspor komoditas lokal;
- l. Pengembangan kultur masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera.

## **9.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam hal ini, dalam melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan untuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (**key performance indicator**). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Nias Yang Berkeadilan, Sejahtera, dan Mandiri Yang Dilayani Oleh Pemerintah Yang Bersih Dan Responsif dapat diuraikan sebagai berikut :